

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu isu besar dalam perekonomian yang dihadapi oleh berbagai daerah dan umumnya mengalami kesulitan dalam menekan peningkatan angka pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan yang diakibatkan oleh ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia (Sulasih *et al.*, 2023). Terdapat empat hal yang membuat seseorang menganggur; beberapa karena mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau perusahaan di tempat kerjanya mengalami penutupan; karena memilih untuk meninggalkan pekerjaannya; terdapat beberapa orang yang sebelumnya bekerja di sektor non-pasar dan kemudian kembali ke pasar tenaga kerja untuk mencari pekerjaan; dan yang terakhir terdapat beberapa lulusan baru dari sekolah menengah atau perguruan tinggi yang mencari pekerjaan (Borjas, 2019).

Pengangguran menimbulkan masalah sosial jika terus dibiarkan karena dapat memicu peningkatan kriminalitas. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan cenderung akan melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup. Di sisi ekonomi, pengangguran juga merupakan isu makroekonomi (Kurniawan *et al.*, 2023).

Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah menunjukkan bahwa terdapat individu yang tidak memiliki pekerjaan sehingga individu tersebut tidak memiliki pendapatan dan akan menurunkan daya beli. Sedangkan,



pendapatan individu merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi angka pengangguran, maka semakin rendah pula kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kep. Riau, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (persen)

Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	10.46	9.82	8.31	7.44	6.75
Banten	10.64	8.98	8.09	7.52	6.68
Kep. Riau	10.34	9.91	8.23	6.80	6.39
DKI Jakarta	10.95	8.50	7.18	6.53	6.21
Indonesia	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan pada Tabel 1.1, terdapat empat provinsi di Indonesia yang secara konsisten termasuk dalam kategori provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi selama lima tahun terakhir, di antaranya adalah Jawa Barat, Banten, Kep. Riau, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2020 DKI Jakarta menempati posisi teratas provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi yaitu 10.95 persen dan terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga 6.21 persen. Meskipun terus mengalami penurunan tiap tahunnya, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 4.91 persen.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi yang tidak hanya menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa, tetapi juga peningkatan rata-rata kesejahteraan penduduk. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PDRB per kapita memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ketenagakerjaan. Salah satu dimensi penting yang dapat terpengaruh oleh perubahan PDRB per kapita adalah tingkat pengangguran.

Kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan adanya kemajuan ekonomi yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Dengan meningkatnya daya beli dan aktivitas ekonomi, sektor-sektor usaha akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan produksi, sehingga potensi penyerapan tenaga kerja meningkat dan pengangguran cenderung menurun. Namun, apabila peningkatan PDRB per kapita tidak diiringi dengan distribusi kesempatan kerja yang merata, maka kesenjangan pendapatan dapat melebar dan pengangguran tetap bertahan pada tingkat yang tinggi.

Migran masuk merupakan salah satu indikator yang berkontribusi terhadap dinamika pengangguran. Namun, arus migran masuk ke suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh peluang kerja, tetapi juga oleh kualitas hidup dan biaya yang harus ditanggung. DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki IPM yang tinggi, yang mencerminkan kualitas pendidikan,

hatan, dan standar hidup yang baik. Meskipun demikian, tingginya IPM seringkali diiringi oleh biaya hidup yang mahal dan persaingan kerja yang



ketat. Kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi calon migran dari daerah lain, terutama mereka yang berasal dari wilayah dengan kemampuan ekonomi lebih rendah (Sjaastad, 1962). Akibatnya, arus migran masuk dapat menurun, sehingga tekanan terhadap pasar tenaga kerja menjadi lebih terkendali dan potensi peningkatan pengangguran akibat migrasi berlebihan dapat diminimalkan.

IPM memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi PDRB, migran masuk, dan tingkat pengangguran, baik secara langsung maupun tidak langsung. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik dari segi pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak. Seseorang dengan pendidikan tinggi lebih mudah memperoleh pekerjaan yang baik, standar hidup yang baik, dan gaji yang tinggi (Rakasiwi & Kautsar, 2021). Peningkatan IPM, terutama dalam aspek pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong PDRB per kapita dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari sisi pengangguran, indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat membantu menekan angka pengangguran dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja, sehingga lebih mudah terserap dalam pasar kerja.

Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menjadi pusat perdagangan, jasa, dan industri yang menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah adalah indeks pembangunan manusia, yang mencerminkan aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan data dari badan pusat statistik, <s pembangunan manusia DKI Jakarta tergolong sangat tinggi, dengan



nilai di atas 80 persen. Peningkatan IPM dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita yang lebih baik serta meningkatkan daya saing tenaga kerja, sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran. Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun IPM DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya, angka pengangguran di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Selain itu, meskipun nilai PDRB per kapita di DKI Jakarta baik, pengaruhnya terhadap pengurangan pengangguran belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, arus migrasi masuk ke DKI Jakarta terus terjadi yang berpotensi menambah tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, migran masuk risen, dan tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui PDRB per kapita dan Migran Masuk Risen di DKI Jakarta”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah, apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita dan migran masuk risen di DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap



tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita dan migran masuk risen di DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembaca baik masyarakat secara umum maupun akademisi yang ingin mengetahui terkait pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita dan migran masuk risen di DKI Jakarta serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jumlah pekerja atau pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja. Pengangguran dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian karena produktivitas yang rendah mengurangi pendapatan masyarakat, yang mengakibatkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merujuk pada sebagian tenaga kerja yang menganggur tetapi secara aktif mencari dan siap bekerja. Berdasarkan Sakernas pengangguran terbuka meliputi: Penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan; Penduduk yang tidak bekerja dan berencana mendirikan perusahaan; Penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena beranggapan tidak mungkin memperoleh pekerjaan; Penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan karena telah diterima tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2021).

Hukum Okun, yang dikemukakan oleh Arthur Okun, menjelaskan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Menurut hukum ini, jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2 persen, maka dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1

persen (Samuelson & Nordhaus, 2009). Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mencerminkan peningkatan output, tetapi juga berperan



dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, Hukum Okun dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di DKI Jakarta.

Romer menjelaskan beberapa model pengangguran dalam pasar tenaga kerja yang terkait dengan migrasi tenaga kerja yaitu *Model Search and Matching* dan *Model Insider-Outsider* (Parker, 2010). *Model Search and Matching* menjelaskan bahwa pengangguran terjadi bukan hanya karena kurangnya lapangan kerja, tetapi juga karena proses penyesuaian antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tidak selalu berjalan secara langsung dan efisien. Model ini menyoroti bahwa tidak semua pekerjaan sesuai dengan keterampilan tenaga kerja yang masuk ke pasar, sehingga diperlukan waktu bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Individu yang berpindah ke daerah perkotaan sering kali memiliki harapan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, hal tersebut tidak dapat terjadi secara langsung karena harus menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan industri yang ada.

Model Insider-Outsider menjelaskan bahwa pekerja lama (*insiders*) yang sudah bekerja di suatu perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan pencari kerja baru (*outsiders*), termasuk mereka yang berasal dari daerah lain. Pekerja lama sering kali mendapatkan perlindungan kerja yang lebih kuat, stabilitas upah, dan prioritas dalam mempertahankan pekerjaan, sementara pekerja baru, termasuk mereka yang berasal dari daerah lain, harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tersisa. Jika aktivitas perusahaan menurun atau terjadi ketidakpastian ekonomi,



outsiders akan menjadi pihak pertama yang kehilangan pekerjaan, sedangkan *insiders* tetap dipertahankan.

2.1.2. Migran Masuk Risen

Migrasi masuk, atau imigrasi, adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan menetap, baik secara permanen maupun sementara. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk berpindah ke wilayah baru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), migrasi penduduk dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya berdasarkan periode waktu tinggal di wilayah tujuan. Migran Seumur Hidup yang merupakan penduduk yang tinggal di tempat berbeda dengan tempat lahirnya, tanpa memperhatikan kapan ia pindah. Migran Masuk Risen atau sering disebut juga *recent in-migrant* yang adalah penduduk yang pada waktu survei bertempat tinggal di wilayah yang berbeda dari tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Beberapa teori telah dikembangkan untuk memahami fenomena migrasi masuk, salah satunya adalah Teori Dorong-Tarik (*Push-Pull Theory*) menjelaskan bahwa migrasi terjadi karena faktor pendorong dari daerah asal, seperti kondisi ekonomi yang buruk dan konflik, serta faktor penarik di daerah tujuan, seperti peluang kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta kualitas hidup yang lebih tinggi (Lee, 1966). Dalam hal ini indeks pembangunan manusia tergolong dalam faktor penarik, karena mengukur kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Artinya, semakin tinggi indeks pembangunan manusia suatu wilayah, semakin kuat daya tariknya sebagai daerah tujuan migrasi.

Selain itu, teori migrasi neo-klasik yang dikemukakan oleh Todaro fokus pada perbedaan upah dan kesempatan kerja antara daerah asal



dan tujuan sebagai pendorong utama migrasi, di mana individu dianggap sebagai agen rasional yang bermigrasi untuk memaksimalkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Teori migrasi baru (*new economics of labor migration*) menekankan bahwa keputusan migrasi tidak hanya didasarkan pada individu, tetapi juga pada strategi rumah tangga untuk mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan pendapatan (Stark & Bloom, 1985).

Migrasi masuk memiliki dampak yang kompleks terhadap daerah tujuan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun demografi. Dari sisi ekonomi, migran dapat mengisi kekosongan tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, migrasi masuk justru dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan menekan upah lokal (Dustmann & Frattini, 2014).

Secara sosial, kehadiran migran dapat memperkaya keragaman budaya, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal integrasi dan potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, dalam aspek demografi, migrasi masuk dapat mempengaruhi struktur usia dan komposisi penduduk di daerah tujuan, yang berdampak pada kebutuhan layanan publik dan perencanaan pembangunan.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Secara umum, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, tanpa memperhitungkan kewarganegaraan pelaku usahanya. PDRB menggambarkan total output ekonomi suatu daerah dan mencerminkan



kemampuan daerah tersebut dalam menciptakan barang dan jasa sebagai hasil aktivitas produksi.

Nilai tambah bruto dalam PDRB diperoleh dari selisih antara nilai produksi dan biaya antara atau input antara yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, PDRB memberikan informasi penting mengenai seberapa besar kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total aktivitas ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi (menilai kontribusi masing-masing sektor), pendekatan pendapatan (menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi), dan pendekatan pengeluaran (menjumlahkan pengeluaran konsumsi, investasi, pemerintah, dan ekspor neto).

Selain itu, PDRB juga dapat dinyatakan dalam dua jenis harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan dan mencakup pengaruh inflasi. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu, sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terdistorsi oleh perubahan harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk suatu wilayah berdasarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada wilayah dan periode yang sama. Dengan demikian, PDRB per kapita mencerminkan

ampuan ekonomi rata-rata penduduk dan sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita atas dasar harga



berlaku mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk berdasarkan nilai tambah yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sehingga nilai ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan inflasi

PDRB didorong oleh IPM yang meningkat, dimana hal tersebut mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Investasi pada pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi pada manusia yang akan memberikan hasil yaitu peningkatan produktivitas dan output ekonomi (Becker, 1993). Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa modal manusia adalah faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang bersumber dari sumber daya manusia berkualitas menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Romer, 1990).

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) awalnya memperkenalkan konsep pembangunan manusia pada tahun 1990, dengan diterbitkannya *Human Development Report* (HDR). Menurut penilaian UNDP, manusia adalah kekayaan sejati bangsa. Pembangunan manusia memandang manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya sekadar input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan tempat individu dapat hidup dengan umur panjang, sehat, dan produktif. Dengan demikian, UNDP menetapkan tiga dimensi yang membentuk indeks pembangunan manusia. Ketiga dimensi ini telah lama digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup manusia. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: hidup sehat dan umur panjang; pengetahuan; dan standar hidup yang layak.



Indikator harapan hidup saat lahir merupakan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Pentingnya harapan hidup berasal dari persepsi luas bahwa umur panjang itu merupakan hal yang sangat berharga, serta kenyataan bahwa sejumlah faktor, seperti pola makan yang tepat dan kesehatan yang baik, secara tidak langsung terkait dengan hal tersebut. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan dimensi pengetahuan, yang menunjukkan seberapa mudah masyarakat mengakses pendidikan, terutama pendidikan berkualitas tinggi, yang sangat penting bagi masyarakat modern yang produktif.

HLS menunjukkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, dan RLS menunjukkan jumlah modal manusia yang dimiliki pada suatu wilayah. Pemenuhan standar hidup yang layak merupakan dimensi ketiga dari pembangunan manusia. Untuk mengukur dimensi ini, UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Namun, pengukuran pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dipilih sebagai alternatif karena data di tingkat daerah tidak tersedia. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan diperoleh dari hasil survei harga konsumsi Susenas modul konsumsi, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas non-makanan. Indikator ini juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai hasil dari peningkatan perekonomian. Indikator ini dapat dihitung hingga level kabupaten atau kota (BPS, 2021).

Peningkatan indeks pembangunan manusia menunjukkan adanya peningkatan pada kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kapasitas kerja dan produktivitas. Pendidikan dan kesehatan



yang baik merupakan komponen utama dalam indeks pembangunan manusia dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja, sehingga memperbesar peluang untuk memperoleh pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2020).

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan PDRB Per Kapita

IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa penduduk memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kondisi kesehatan yang lebih baik, dan daya beli yang meningkat. Kondisi ini mendorong produktivitas kerja, kemampuan inovasi, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Barro, 1991). Oleh karena itu, wilayah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih besar, karena setiap individu mampu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih optimal terhadap total *output* wilayah.

2.2.2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Migran Masuk Risen

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun umumnya IPM tinggi sebagai faktor penarik migran, dalam beberapa kondisi IPM yang tinggi justru dapat menurunkan arus migrasi masuk. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori biaya migrasi yang menekankan bahwa keputusan migrasi tidak hanya mempertimbangkan manfaat di daerah tujuan, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan untuk tinggal dan beradaptasi di wilayah tersebut (Sjaastad, 1962).



Wilayah dengan IPM tinggi umumnya memiliki biaya hidup yang tinggi, seperti harga hunian, biaya transportasi, dan biaya kebutuhan pokok yang lebih mahal. Menurut teori permintaan tenaga kerja perkotaan (Harris & Todaro, 1970), tingginya standar hidup dan persaingan di pasar kerja di kota-kota maju dapat menjadi hambatan bagi migran dari daerah dengan kemampuan ekonomi rendah. Kondisi ini membuat sebagian calon migran menunda atau membatalkan rencana pindah karena khawatir tidak mampu bersaing atau bertahan secara finansial di wilayah tujuan.

Selain itu, IPM yang tinggi juga seringkali diikuti oleh standar rekrutmen tenaga kerja yang lebih ketat serta dominasi sektor pekerjaan formal yang memerlukan keterampilan khusus. Hal ini membuat peluang bagi migran berpendidikan rendah menjadi semakin kecil, sehingga mengurangi dorongan mereka untuk berpindah ke wilayah tersebut. Dengan demikian, meskipun IPM mencerminkan kualitas hidup yang tinggi, kombinasi antara tingginya biaya hidup, ketatnya persaingan kerja, dan tingginya standar kualifikasi justru dapat mengurangi minat migran masuk. Dalam konteks ini, IPM yang tinggi berperan sebagai penghalang migrasi, bukan sebagai faktor penarik.

2.2.3. Hubungan PDRB Per Kapita dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

PDRB yang meningkat mencerminkan adanya peningkatan dalam aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Dalam kondisi ini, sektor-sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa cenderung mengalami ekspansi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja lokal maupun pendatang. Dengan

tingkatnya permintaan tenaga kerja, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga tingkat



pengangguran dapat menurun. Selain itu, peningkatan PDRB yang berkelanjutan juga mendorong investasi, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

2.2.4. Hubungan Migran Masuk Risen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Meskipun migran masuk dapat membawa tenaga kerja tambahan ke daerah tujuan, peningkatan jumlah tenaga kerja juga dapat meningkatkan persaingan dalam pasar kerja. Jika jumlah migran yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka persaingan di pasar tenaga kerja akan meningkat, yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran lebih tinggi. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu diimbangi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja, sehingga semakin banyak individu yang bersaing untuk jumlah pekerjaan yang terbatas.

2.2.5. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan PDRB Per Kapita, Migran Masuk Risen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM umumnya berdampak positif terhadap PDRB per kapita, karena sumber daya manusia yang lebih berkualitas cenderung memiliki produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, IPM yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah migran masuk risen.

Berdasarkan teori biaya migrasi, daerah dengan kualitas hidup tinggi

anya memiliki biaya hidup yang mahal serta persaingan kerja yang ketat, sehingga dapat mengurangi minat migran dari wilayah lain untuk masuk.



Terkait tingkat pengangguran terbuka, IPM yang tinggi dapat menurunkan pengangguran secara langsung melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat untuk terserap di pasar kerja. Secara tidak langsung, peningkatan IPM yang mendorong kenaikan PDRB per kapita dapat memperluas kesempatan kerja dan menekan pengangguran. Sementara itu, penurunan jumlah migran masuk akibat IPM tinggi dapat mengurangi tekanan di pasar tenaga kerja, sehingga turut membantu menekan tingkat pengangguran terbuka.

2.3. Studi Empiris

Rohmi, M. L., Mahesa, G. P., & Khairunnisa, N. (2024) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020." Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data sekunder dalam bentuk data time series yang mencakup periode 2011 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka, sedangkan peningkatan kemiskinan dapat menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, mencerminkan hubungan antara kemiskinan, pendidikan, dan kesempatan kerja di DKI Jakarta.

Wibisono, C. G. (2022) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Literasi Masuk, Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur." Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel yang



mencakup tiga puluh delapan kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi masuk dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah migrasi ke provinsi tersebut dan perbedaan upah minimum antara daerah berdampak pada peningkatan pengangguran, meskipun pendidikan yang lebih tinggi tidak berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi pengangguran.

Lestari, N. D., & Woyanti, N. (2020) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh PDRB, UMK, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Jumlah Pengangguran di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2017" Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan pendekatan Random Effect Model dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran, sedangkan UMK berpengaruh negatif dan signifikan. Selain itu, jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, sementara inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan PDRB yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai dapat meningkatkan pengangguran, sedangkan kenaikan UMK berpotensi mengurangi pengangguran, menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Cahya, A. A., & Tanur, E. (2022) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Wilayah Urban Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara" Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan data sekunder yang diperoleh



dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk di wilayah urban, rata-rata lama sekolah, jumlah pusat perdagangan, dan sarana akomodasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara parsial, variabel persentase penduduk urban, pusat perdagangan, dan sarana akomodasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan diikuti oleh peningkatan pengangguran, yang menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja di wilayah urban.

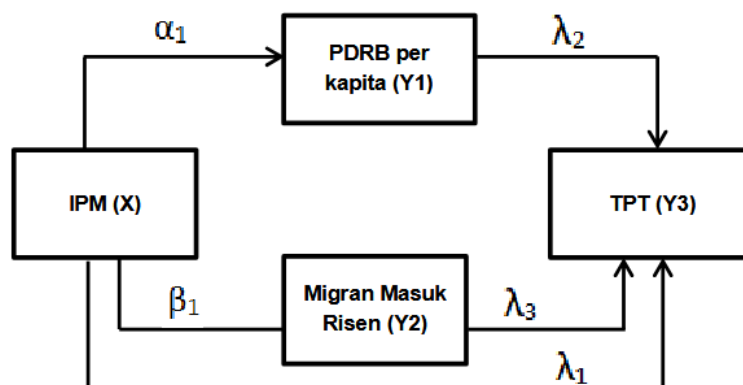
Sari, S. A. E. & Pangestuty, F. W. (2022) melakukan penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2020" Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel yang mencakup lima belas kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pendidikan yang lebih tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja, yang berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka pikir penelitian menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah IPM.

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita, Migran Masuk Risen, dan TPT.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM mendorong kenaikan PDRB per kapita karena sumber daya manusia yang lebih berkualitas mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, IPM yang tinggi justru dapat menurunkan jumlah migran masuk risen, karena tingginya biaya hidup dan ketatnya persaingan kerja di wilayah dengan kualitas hidup tinggi dapat menjadi hambatan bagi calon migran dari daerah dengan kemampuan ekonomi lebih rendah. Secara langsung, IPM yang tinggi dapat menurunkan pengangguran karena masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik. Secara tidak langsung, melalui kenaikan PDRB per kapita dan penurunan migran masuk, IPM juga dapat menekan tingkat pengangguran dengan mengurangi tekanan pada pasar tenaga kerja.

2.5. Hipotesis Penelitian



Hipotesis adalah asumsi sementara atau dugaan sementara untuk awab suatu masalah yang kebenarannya belum teruji dengan data

terkini. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga IPM berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita di DKI Jakarta.
2. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap Migran Masuk Risen di DKI Jakarta.
3. Diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap TPT di DKI Jakarta.
4. Diduga Migran Masuk Risen berpengaruh positif terhadap TPT di DKI Jakarta.
5. Diduga IPM berpengaruh negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap TPT melalui PDRB per kapita dan Migran Masuk Risen di DKI Jakarta.

